

ANCAMAN KOREA UTARA DAN STABILITAS KAWASAN

Simela Victor Muhamad^{*)}



Abstrak

Korea Utara kembali menarik perhatian dunia internasional belakangan ini, karena rezim diktator negara tersebut mengancam akan menembakkan roket berhulu ledak ke arah Amerika Serikat sebagai reaksi atas disepakatinya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengancam peluncuran roket Korut pada bulan Desember 2012 lalu. Ancaman tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan berdampak pada stabilitas kawasan. Negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Indonesia, perlu mengambil bagian dalam mengupayakan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea tersebut.

A. Pendahuluan

Korea Utara (Korut) belakangan ini kembali menjadi pemberitaan media massa dan perhatian dunia internasional, terutama setelah keluar pernyataan (*statement*) dari pejabat pemerintah Korut pada 24 Januari 2013 yang mengancam akan meluncurkan roket berhulu ledak langsung ke arah Amerika Serikat (AS). Ancaman Korut tersebut dilontarkan sebagai reaksi negara komunis itu terhadap dikeluarkannya resolusi baru Dewan Keamanan (DK) PBB pada 22 Januari 2013 yang berisi ancaman keras atas uji coba peluncuran roket jarak jauh Korut pada 12 Desember 2012. Draf

resolusi DK PBB tersebut digagas AS melalui proses negosiasi yang alot dan mendapatkan persetujuan China, sekutu terdekat Korut.

Ancaman Korut tersebut terbilang serius karena dilontarkan secara terbuka oleh pejabat pemerintah dari Komisi Pertahanan Nasional, sebuah lembaga tertinggi di Korut, yang dipimpin langsung oleh Kim Jong-un (pemimpin tertinggi Korut). Negara-negara di kawasan kiranya perlu menyikapi secara serius ancaman Korut karena bukan tidak mungkin, jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan Korut, ancaman Korut tersebut dapat menjadi kenyataan dan mengancam stabilitas kawasan.

^{*)} Peneliti bidang Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: victorsimela@yahoo.co.id



B. Ancaman dan Potensi Persenjataan Korut

Munculnya ancaman dari Korut bukan kali pertama ini mengemuka, tetapi kerap dilontarkan Korut sebagai respons atas aksi PBB dan AS yang kerap mengkritisi dan menentang program nuklir Korut. Bedanya kali ini, Korut lebih terbuka menyampaikan pernyataan ancamannya dan secara langsung dikemukakan oleh Komisi Pertahanan Nasional, yang antara lain mengatakan bahwa sejumlah roket jarak jauh dan uji coba nuklir yang dilakukannya selama ini memang ditujukan kepada AS, yang dipandang sebagai musuh utamanya. Bahkan Kim Jong-un sendiri, sebagai pemimpin tertinggi Korut, menegaskan sikapnya yang akan menentang sikap permusuhan AS dan mendukung berbagai pernyataan pemerintah Korut belakangan ini yang akan mengambil langkah tegas untuk membela martabat dan kedaulatan bangsa.

Pernyataan ancaman seperti itu sebelum ini jarang dilontarkan, terutama langsung oleh lembaga tertinggi Korut, Komisi Pertahanan Nasional. Ini artinya, bahwa ada semacam keseriusan dan komitmen dari Jong-un dalam membangun program peluru kendali (rudal) balistik dan senjata nuklir Korut, meskipun hal itu berarti menentang dan mengabaikan ancaman dari DK PBB sebelumnya. Dunia Barat yakin, Korut telah meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi nuklir dan persenjataan rudalnya ke level yang lebih tinggi.

Menurut pakar dari Sejong Institute, Korea Selatan (Korsel), Cheong Seong-chang, uji coba nuklir Korut berikutnya diperkirakan mengacu pada pembuatan perangkat baru dari proses pengayaan uranium. Bom uranium dinilai jauh lebih mudah dibuat dalam bentuk kecil daripada bom plutonium, yang diujicobakan pada tahun 2006 dan 2009. Sejumlah pakar lainnya meyakini Korut tengah mengupayakan uji coba perangkat nuklir baru. Mereka juga belajar merakitnya menjadi lebih kecil sehingga bisa dimuat ke dalam hulu ledak rudal jarak jauh. Korut yang sudah sekian lama mengisolasi diri, ditambah bertahun-tahun sanksi internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan, kapasitas teknologi dan persenjataannya memang terbatas. Namun, menurut para ahli, bukan berarti tidak ada upaya dari Korut untuk mengembangkan kemampuan teknologinya, termasuk teknologi nuklir dan rudal jarak jauh.

Kemampuan rudal terutama diukur dengan “jarak tembak” dan “tingkat ketepatan mengenai sasaran.” Tingkat keakuratan rudal Korut tidak begitu menjadi masalah. Untuk rudal balistik IRBM, misalnya, ada kemungkinan bahwa rudal Korut tersebut bisa menghantam suatu daerah di dalam wilayah Jepang atau benua Amerika, dan hal itu akan menjadi ancaman serius. Para ahli menilai kemampuan serangan rudal Korut secara nyata tidak begitu menjadi ancaman karena tingkat keakuratan rudal negara komunis itu sangat kurang. Tetapi, masyarakat internasional merasa khawatir bahwa rudal Korut akan menjadi ancaman besar karena pada kenyataannya Korut terus memperbaiki teknologi rudal untuk memperoleh rudal berjarak tempuh lebih panjang dan tingkat keakuratannya lebih tinggi. Terlebih, pihak Korut sendiri pernah mengklaim bahwa wilayah AS berada dalam jangkauan rudal Korut, termasuk pangkalan AS di Jepang, Guam dan daratan AS. Klaim tersebut muncul setelah AS dan Korsel membuat kesepakatan yang memungkinkan Seoul untuk memperluas jangkauan rudal balistik, dari 300 km menjadi 800 km.

Terkait dengan potensi persenjataan militer dan nuklir Korut, dapat digambarkan sekilas bahwa negara itu memiliki cukup sumber plutonium untuk membangun enam sampai tujuh senjata atom dan diperkirakan hampir bisa memproduksi rudal nuklir. Korut memiliki setidaknya 1.000 rudal dalam berbagai tipe, termasuk dengan jarak jangkauan mencapai lebih dari 3.000 kilometer, dan telah melakukan beberapa kali uji coba peluncuran, di antaranya rudal antarbenua Taepodong-1 dan rudal Taepodong-2 yang lebih canggih dan memiliki daya jangkau yang lebih jauh. Korut juga diyakini memiliki senjata kimia yang dapat dikirim dengan artileri jarak jauh, peluncur roket, rudal balistik, pesawat terbang dan kapal laut.

Dengan potensi persenjataan Korut di atas, ditambah kekuatan militer darat, laut dan udara yang dimilikinya, Korut dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan di kawasan, jika solusi damai untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan Korut, termasuk isu nuklir, tidak tercapai. Bukan tidak mungkin, rezim otoriter Korut yang ditekan secara internasional, di bawah kepemimpinan Jong-un yang masih muda dan pengaruh kuat pejabat senior garis keras (seperti pamannya, Jang Song-thaek), Korut mengambil langkah militer ketimbang diplomasi

dalam berhadapan dengan pihak-pihak yang menentang terutama Korsel dan AS.

C. Stabilitas Kawasan Perlu Dijaga

Terganggunya stabilitas keamanan di kawasan sebagai akibat dari persoalan yang dihadapi Korut, jelas tidak menguntungkan bagi negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Indonesia di dalamnya. Ketidakstabilan yang terjadi di Semenanjung Korea, sebagai akibat dari adanya langkah militer yang ditempuh Korut, tidak saja akan memiliki dampak bagi stabilitas keamanan di Semenanjung Korea, tetapi juga akan berdampak luas terhadap kawasan Asia Pasifik lainnya, baik itu Asia Timur maupun Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan dan masyarakat internasional perlu merespons serius ancaman Korut melalui upaya diplomasi yang lebih efektif lagi untuk mencegah Korut tidak mengambil langkah militer yang dapat membahayakan stabilitas kawasan.

PBB, sebagai lembaga multilateral yang bertanggung jawab atas terciptanya keamanan dan perdamaian dunia, harus terus mendorong dan memberi ruang bagi proses pencarian solusi dengan cara dialog dalam menghadapi persoalan terkait Korut. Tidak dinafikan bahwa pemberian sanksi oleh DK PBB terhadap Korut, menjadi salah satu cara untuk menekan Korut agar rezim yang berkuasa di negara komunis tersebut bersedia membuka diri dan berdialog dalam mencari solusi damai atas permasalahan yang melibatkan Korut selama ini, terutama terkait dengan program nuklirnya. Namun, di sisi lain, tidak bisa dihindarkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh DK PBB terhadap Korut, terutama sanksi yang baru dikeluarkan, telah menimbulkan kemarahan Pyongyang yang kemudian mengancam akan melakukan perlawanan terhadap sanksi DK PBB tersebut.

Memerhatikan perilaku Korut selama ini yang selalu mengabaikan sanksi PBB, maka upaya “menekan” Korut agar bersedia melakukan perundingan tidak cukup dilakukan melalui jalur PBB. Masyarakat internasional lain, terutama yang berada di kawasan, juga perlu mengambil peran dalam mendorong terwujudnya perundingan dengan Korut. Forum perundingan enam negara (yang dikenal dengan

six party talks), yang kini macet dan pernah terselenggara, perlu didorong dan dihidupkan kembali oleh China, Jepang, Korsel, AS, dan Rusia, karena forum inilah kiranya yang paling tepat untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan situasi di Semenanjung Korea. Perundingan ini melibatkan Korsel, Korut, Jepang, China, AS, dan Rusia.

ASEAN juga perlu mengambil peran untuk mendorong terwujudnya situasi kondusif di Semenanjung Korea, karena dampak dari terjadinya ketidakstabilan di Semenanjung Korea akan juga dirasakan oleh negara-negara Asia Tenggara. Apalagi Jepang dan Korsel yang berseberangan dengan Korut memiliki hubungan kerja sama erat di bidang ekonomi dengan hampir semua negara Asia Tenggara. Di sini ASEAN harus dapat memanfaatkan pertemuan ARF (*ASEAN Regional Forum*), di mana Korut juga pernah hadir dalam forum ini, sebagai media untuk mendorong terwujudnya perundingan damai di Semenanjung Korea.

D. Penutup

Ketidakstabilan kawasan sebagai akibat dari adanya ancaman Korut harus dicegah oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan juga memiliki posisi penting di kawasan (baik Asia Tenggara maupun Asia Pasifik), Indonesia juga perlu berperan dalam mendorong terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Berbagai akses diplomasi (baik itu bilateral maupun multilateral) perlu dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia, bahkan oleh parlemen (melalui diplomasi parlementer di berbagai forum antarparlemen), untuk mengingatkan arti penting terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk di Semenanjung Korea.

Berbagai ancaman militer yang dilontarkan oleh suatu negara terhadap negara lain, seperti Korut terhadap AS, harus dihindari karena akan berdampak pada stabilitas kawasan. Kepemimpinan Kim Jong-un yang masih muda, dan konon kabarnya pernah mengenyam pendidikan di negara barat, kiranya perlu “dimanfaatkan” oleh para pemimpin negara-negara di kawasan (termasuk Indonesia) untuk merajut dialog yang lebih terbuka.

Rujukan:

1. "Usulan Sanksi untuk Korut Diperberat," *Kompas*, 23 Januari 2013.
2. "After UN acts, N. Korea vows to beef up nukes," *The Jakarta Post*, 23 Januari 2013.
3. "S. Korea's Park open to dialogue with N. Korea," *The Jakarta Post*, 25 Januari 2013.
4. "Korut Ancam Tembakkan Rudal," *Media Indonesia*, 25 Januari 2013.
5. "Eskalasi Ancaman Nuklir Korea Utara," *Media Indonesia*, 25 Januari 2013.
6. "What's the threat? North Korean rhetoric, reality," *The Jakarta Post*, 25 Januari 2013.
7. "Korut Ingatkan Korsel," *Republika*, 26 Januari 2013.